

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah variasi kegiatan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas baik sarana maupun prasarana serta pelayanan wisata yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Sementara menurut Devy (2017) pariwisata merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan meliputi objek wisata, perjalanan wisata, wisatawan, industri wisata dan hal lain yang termasuk kegiatan pariwisata. Devy beranggapan bahwa pariwisata merupakan salah satu sumber utama devisa negara Indonesia, dikarenakan keberagaman jenis wisata seperti wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sosial yang tersebar di negara ini. Sementara menurut Rani (2014) kegiatan usaha pariwisata bertujuan untuk mengusahakan atau menyediakan objek dan daya tarik wisata, usaha industri pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan wisata. Industri pariwisata menurut Rani merupakan suatu bentuk organisasi, yang meliputi pemerintah, masyarakat, maupun swasta, dengan tujuan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran wisata.

Berdasarkan seluruh pengertian pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang berada di luar tempat tinggal wisatawan. Pariwisata pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang terdiri dari objek wisata, perjalanan wisata, wisatawan, industri wisata dan hal lain yang termasuk kegiatan pariwisata. Serta dalam upaya mewujudkan kegiatan pariwisata tersebut, dibutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholders* guna menciptakan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat baik sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat sekitar pada khususnya dan negara pada umumnya.

2.2 Potensi Pariwisata

2.2.1 Komponen Potensi Pariwisata

Dalam pengembangan suatu wisata diperlukan komponen-komponen yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan wisata tersebut. Definisi terkait setiap komponen pariwisata menurut Zaenuri (1012) yaitu sebagai berikut:

- a. Daya tarik, merupakan obyek yang memiliki daya tarik untuk dilihat, ditonton, dinikmati yang layak untuk dijual ke pasar wisata
- b. Aksesibilitas, merupakan prasarana yang dibangun agar wisatawan dapat mencapai obyek wisata
- c. Sarana dan prasarana penunjang, merupakan Segala macam fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata

Adapun komponen-komponen pariwisata menurut Nawangsari (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata terdiri dari:
 - a. Keindahan objek wisata, jenis keindahan meliputi: air, geologi, flora, dan fauna
 - b. Keunikan yakni meliputi kualitas, kondisi, dan kesan yang ditimbulkan
2. Aksesibilitas terkait alan atau akses menuju obyek wisata yakni jarak objek wisata dari jalan raya (jalan kabupaten)
3. Sarana dan prasarana terdiri dari prasarana air bersih, warung makan, sarana ibadah, toko souvenir/ oleh-oleh, prasarana listrik, MCK atau toilet, jaringan telekomunikasi (wifi, jaringan telfon rumah, dan signal hp), tempat parkir, dan penginapan.

Sementara menurut Warang (2015) menjelaskan komponen pariwisata dapat terbagi sebagai berikut:

1. Daya tarik wisata pada suatu objek wisata dapat berupa hasil kesenian budaya daerah yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut.
2. Aksesibilitas adalah akses atau jalan menuju objek wisata. Komponen-komponen penting didalam aksesibilitas meliputi waktu menuju tempat wisata dan transportasi darat yakni banyaknya kendaraan ke tempat wisata.

3. Amenitas merupakan sarana yang mendukung kegiatan wisata terdiri dari pusat informasi wisata, toko cinderamata, rumah makan, ketersediaan air bersih dan listrik, sarana kesehatan, pos keamanan, sarana komunikasi, dan bank.

4. *Tourist Organization* berfungsi dalam perencanaan pengembangan pariwisata, mengatur pelaksanaan kegiatan pariwisata, dan adanya monitoring perkembangan serta pengendalian pemanfaatan pariwisata.

Sedangkan menurut Samiarta dan Mahagangga (2016), komponen pariwisata yaitu meliputi:

1. Daya tarik wisata yang terdiri dari atraksi alam, atraksi buatan, dan atraksi budaya.
2. Sarana pariwisata meliputi berbagai jenis sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berada di kawasan objek wisata seperti fasilitas penunjang kepariwisataan diantaranya terdapatnya parkir, tempat sampah, toilet umum, dan juga *home stay*.
3. Aksesibilitas, berada pada posisi yang strategis.
4. Pelayanan tambahan, dapat berupa pelayanan berupa kemudahan akses dalam memperoleh air dan listrik.
5. Organisasi pariwisata, perkembangan suatu wisata dapat melahirkan keberadaan suatu kelompok swadaya yang ada di wisata tersebut yakni kelompok POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). POKDARWIS kemudian dijadikan mesin penggerak bagi pengembangan wisata melalui upaya-upaya seperti penetapan program kerja wisata, termasuk kegiatan promosi wisata, dan kegiatan kajian pengembangan wisata.

Organisasi pariwisata tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan dan pelayanan pariwisata. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025, pengelolaan dan pelayanan adalah pengusahaan usaha pariwisata untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Berdasarkan pedoman Analisis Daerah Operasi Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (2003), komponen yang dinilai pada objek wisata meliputi:

- www.itk.ac.id
- a. Daya tarik wisata sumber daya alam yang menonjol, variasi kegiatan wisata, keunikan sumber daya alam, kebersihan, dan keamanan
 - b. Aksesibilitas meliputi jarak jalan darat dari ibu kota provinsi, waktu tempuh dari ibu kota provinsi, dan frekuensi kendaraan ke objek wisata
 - c. Akomodasi meliputi jarak dan jumlah tempat penginapan di sekitar objek wisata. Sementara berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025 akomodasi adalah usaha penyediaan kamar.
 - d. Sarana dan prasarana penunjang meliputi sarana akomodasi, sarana angkutan umum, rumah makan/minum, sarana wisata budaya, sarana wisata tirta, dan kios cenderamata dan areal parkir, prasarana jalan, jembatan, jaringan telepon, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan drainase/saluran, sistem pembuangan limbah, dermaga atau pelabhan, dan helipad
 - e. Sosial ekonomi meliputi jumlah penduduk, pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dari kegiatan pariwisata, jumlah wisatawan di lokasi wisata meningkat, mata pencaharian, dan pendidikan masyarakat lokal
 - f. Ketersediaan air bersih meliputi jarak lokasi air bersih terhadap lokasi objek wisata, volume, kelayakan dikonsumsi, kemudahan air dialirkan ke objek wisata, dan lama ketersediaan air bersih. Kemudian menurut Susanti (2010), kondisi geografi atau jarak lokasi air bersih terhadap objek wisata dan topografi mempengaruhi penyediaan air bersih di suatu lokasi wisata, dimana kondisi topografi berkaitan dengan kemudahan atau dapat tidaknya air dialirkan ke objek wisata.
 - g. Pengelolaan dan pelayanan meliputi perencanaan objek, pengorganisasian, pelaksanaan/operasional, dan pengendalian pemanfaatan serta kemampuan berbahasa oleh pengelola

2.2.2 Pengembangan Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki suatu wilayah atau daerah perlu untuk dikembangkan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Menurut Sastrayuda (2010), prinsip pengelolaan pengembangan wisata antara lain meliputi:

- a. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang

- b. Memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat
- c. Kontribusi dari masyarakat setempat
- d. Mengaplikasikan pengembangan wisata

Sementara menurut Arida (2015), dalam pengembangan wisata diperlukan adanya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemerataan manfaat dan keuntungan dari pembangunan wisata salah satunya melalui kegiatan usaha ekonomi wisata. Selain itu menurut Fyka (2018), pengaruh wisata terhadap kondisi sosial ekonomi adalah berupa peningkatan pendapatan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Kemudian menurut Juhannis (2014), aspek yang memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat dari kegiatan wisata meliputi tingkat pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, mata pencaharian, dan pendidikan. Definisi terkait kondisi sosial ekonomi sendiri merupakan keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya yang ditentukan terhadap jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapatan.

Berdasarkan komponen potensi pariwisata yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli sebelumnya, maka didapatkan hasil sintesa yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Diskusi Teori Potensi Pariwisata

Sumber	Variabel	Indikator
Nawang Sari (2018), Warang (2015), Samiarta dan Mahagangga	Potensi pariwisata	Daya Tarik
(2016), Arida		Aksesibilitas
(2015), Sastrayuda		Akomodasi
(2010), Fyka		Sarana dan prasarana
(2018), Juhannis		Kondisi sosial ekonomi
(2014), dan		Ketersediaan air bersih
Pedoman (ADO- ODTWA) (2003)		Pengelolaan dan pelayanan

*) Sintesa Pustaka, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas variabel yang digunakan pada sasaran dua adalah meliputi jarak, sarana dan prasarana, aksesibilitas, daya tarik, pengelola, atraksi hiburan kesenian, keamanan, dan ekonomi.

2.3 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata menurut Fitroh (2017) merupakan sesuatu yang memiliki keindahan dan dapat berupa keunikan objek wisata seperti kekayaan budaya hasil buatan manusia sehingga mampu mendorong wisatawan untuk berkunjung dan melakukan kegiatan wisata di suatu objek wisata. Sementara menurut Nawangsari (2018), suatu produk atraksi wisata setidaknya terdiri dari:

- a. Keunikan yakni meliputi kesan yang ditimbulkan, kondisi, dan kualitas
- b. Keindahan objek wisata meliputi: air, fauna, geologi, dan flora

Adapun jenis atraksi wisata menurut Samiarta dan Mahagangga (2016) meliputi atraksi buatan, atraksi alam, dan atraksi budaya. Sejalan dengan pendapat tersebut, atraksi wisata atau daya tarik wisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan terdiri atas:

1. Daya tarik wisata alam, yaitu atraksi wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan berwujud ekosistem sumber daya alam yang memiliki daya tarik bagi wisatawan baik dalam keadaan alami ataupun buatan.
2. Daya tarik wisata budaya, yaitu atraksi wisata dengan daya tarik dari tradisi atau kebiasaan manusia seperti adat-istiadat.
3. Daya tarik wisata buatan manusia, yaitu daya tarik dari hasil buatan atau karya manusia yang dapat berwujud wisata agro, wisata petualangan alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya, taman rekreasi, wisata buru, museum, dan komplek hiburan.
4. Daya tarik wisata minat khusus, dapat berupa kegiatan mendaki, berburu, gua, industri, gunung, dan kerajinan, tempat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah atau ziarah, dan lain-lain

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan menurut Muksin (2016), pembagian usaha daya tarik wisata terdiri dari:

1. Daya tarik wisata alam meliputi:
 - a. Keunikan atau kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau
 - b. Flora fauna

- c. Budidaya sumber daya alam, misalnya peternakan, sawah, perkebunan, usaha perikanan
- d. Gejala alam misalnya air terjun, kawah, danau, atau sumber air panas
2. Daya Tarik Wisata Sosial Budaya meliputi:
- Upacara Adat
 - Museum
 - Seni Pertunjukan
 - Peninggalan Sejarah
 - Kerajinan
3. Daya Tarik Wisata Minat Khusus lebih menekankan pada wisatawan yang memiliki motivasi wisata khusus dapat berupa tujuan pengobatan, arung jeram, kegiatan berburu, mendaki gunung, dan agrowisata

Selanjutnya berdasarkan pedoman Analisis Daerah Operasi Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) Direktorat Wisata Alam dan Pemnafaatan Jasa Lingkungan (2003), komponen yang dinilai pada daya tarik wisata meliputi:

- Keunikan sumber daya alam adalah objek-objek yang memiliki ciri khas sumber daya alam dalam suatu lokasi. Keunikan ini dapat berupa air terjun, gua, adat istiadat/budaya, flora, sumber air panas, dan fauna
- Keindahan sumber daya alam yang menonjol objek-objek yang memiliki yang memiliki keindahan alam baik di darat, laut, atau danau. Keindahan ini dapat berupa batuan, flora, fauna, air, dan gejala alam
- Jenis kegiatan wisata alam adalah kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi wisata. Kegiatan tersebut dapat berupa *tracking*, mendaki, *rafting*, *camping*, pendidikan, religi, *hiking*, *canoeing*, mancing, dan lain-lain
- Kebersihan lokasi wisata tidak memiliki pengaruh dari hal seperti sampah, jalan ramai motor/mobil, permukiman penduduk, alam, industri, binatang (pengganggu), dan coret-coret (*vandalism*)
- Keamanan kawasan dari kebakaran, gangguan terhadap flora/fauna, penebangan liar dan perambahan, , masuknya fauna, dan eksotik

Menurut Rohmah (2017), kebersihan merupakan suatu aksi yang dilakukan manusia untuk menghilangkan kotoran yang ada di lingkungan sekitar. Sementara keamanan menurut Mahagangga, dkk (2013) merupakan suatu kondisi yang aman

dan stabil, sehingga menciptakan perasaan yang tenang dan tidak khawatir ketika sedang melakukan kegiatan wisata di suatu destinasi wisata selama beberapa waktu.

Tabel 2. 2 Diskusi Teori Daya Tarik Wisata

Sumber	Variabel	Indikator
Nawangsari (2018), UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, Muksin (2016), dan Pedoman (ADO-ODTWA) (2003)	Daya tarik wisata	Keunikan Sumber Daya Alam (SDA) Keindahan Sumber Daya Alam (SDA) yang menonjol Variasi kegiatan wisata Kebersihan Keamanan

*) Sintesa Pustaka, 2020

2.4 Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Menurut Murdiastuti, dkk (2014), kebijakan pariwisata didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan baik pengelolaan komunitas wisata dan kelestarian lingkungan alam sehingga wisatawan dapat menikmati kegiatan wisata serta memebrikan manfaat kepada kesejahteraan komunitas lokal wisata. Adapun kebijakan pariwisata tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas lingkungan
2. Pengembangan sumber daya manusia
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
4. Pemasaran

Sementara menurut Zaenuri (2012), pemerintah memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata, karena sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pariwisata meliputi:

1. Peraturan peruntukan kawasan pariwisata
2. Perlindungan terhadap lingkungan alam
3. Penyediaan infrastruktur pariwisata

Definisi terkait setiap komponen kebijakan pengembangan pariwisata menurut berbagai sumber dapat dilihat dibawah ini:

1. Infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang mendukung sistem ekonomi dan sosial sehingga menciptakan konektivitas sistem lingkungan (Kodoatie, dkk, 2005)

2. Pemasaran adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menawarkan sesuatu bernilai bagi klien, masyarakat, konsumen, ataupun partner (Hutama dan Subagio, 2014)
3. Lingkungan alam adalah perpaduan antara kondisi sumber daya alam seperti air, tanah, flora dan fauna, energi surya, mineral, serta yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan (Effendi, dkk, 2018)
4. Pendanaan adalah sejumlah uang atau sumber pendapatan lain yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu dengan menyesuaikan ketentuan yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri (Arinta, 1996)
5. Peruntukan kawasan adalah penetapan wilayah dengan fungsi utama kawasan lindung atau kawasan budidaya (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

Kemudian berdasarkan Sabon, dkk (2018), faktor kebijakan pengembangan wisata yang dapat mempengaruhi jumlah wisatawan secara positif meliputi pembangunan infrastruktur, pendanaan, dan strategi pemasaran.

Kebijakan pengembangan pariwisata pada penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan inputan untuk merumuskan strategi pengembangan potensi objek wisata alam dan daya tarik di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu. Kebijakan pengembangan pariwisata yang dijadikan dasar dalam penelitian bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Strategis Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun ulasan terkait kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata tersebut yang dapat mendukung pengembangan wisata alam di Desa Sumber Sari sebagai berikut:

- A. Kebijakan Infrastruktur
 1. Kebijakan berupa peningkatan kualitas sarana prasarana atau amenities pariwisata serta keterhubungan/ konektivitas antar destinasi wisata
 2. Kebijakan berupa pengembangan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan pariwisata

3. Kebijakan berupa pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata www.itk.ac.id

4. Kebijakan berupa pemeliharaan sarana prasarana obyek wisata

5. Kebijakan berupa peningkatan fungsi fasilitas penunjang daya tarik wisata dan aksesibilitas

B. Kebijakan Pemasaran

1. Kebijakan pengoptimalan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata melalui penerapan strategi pemasaran terpadu dengan cara yang bertanggung jawab, efisien, efektif dan bersifat inovatif, interaktif, dan intensif

2. Kebijakan berupa peningkatan pemasaran pariwisata

3. Kebijakan berupa peningkatan konsep *branding* daerah dengan daya tarik wisata alam, sejarah dan budaya di Kalimantan

4. Kebijakan berupa peningkatan dan pembinaan industri pariwisata daerah melalui kerjasama dengan asosiasi kepariwisataan daerah

5. Kebijakan berupa program promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri

6. Kebijakan berupa program peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemasaran pariwisata

7. Kebijakan berupa program sosialisasi, pembentukan dan pembinaan POKDARWIS

C. Kebijakan Lingkungan Alam

1. Kebijakan peningkatan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

2. Kebijakan pengembangan pariwisata yang salah satunya peduli lingkungan

3. Kebijakan pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata berdasarkan potensi yang dimiliki dan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan

D. Kebijakan Pendanaan

1. Kebijakan pendanaan pada program pengembangan dan pelaksanaan pemasaran pariwisata www.itk.ac.id

2. Kebijakan pendanaan pada program pengembangan destinasi pariwisata

- www.itk.ac.id
3. Kebijakan pendanaan pada program pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana dan industri pariwisata
 4. Kebijakan pendanaan pada program pembinaan Desa Wisata
 5. Kebijakan pendanaan pada program pemeliharaan sarana prasarana obyek wisata
 6. Kebijakan pendanaan pada program pembinaan POKDARWIS
 7. Kebijakan pendanaan pada program pembangunan sarana prasarana kepariwisataan
 8. Kebijakan pendanaan pada program sosialisasi, pembentukan dan pembinaan POKDARWIS
 9. Kebijakan optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata

E. Kebijakan Peruntukan Kawasan

1. Kebijakan pembinaan pada desa wisata
2. Kebijakan pengendalian pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata
3. Kebijakan pemantapan fungsi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pengembangan pariwisata

Berdasarkan komponen potensi pariwisata yang telah dipaparkan oleh beberapa sumber sebelumnya, maka didapatkan hasil sintesa yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Diskusi Teori Kebijakan Pariwisata

Sumber	Variabel	Indikator
Murdiastuti, dkk (2014), Zaenuri (2012), Sabon, dkk (2018), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2013), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2025), Rencana Strategis Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021), dan Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021)	Kebijakan pariwisata	Infrastuktur
		Pemasaran
		Lingkungan alam
		Pendanaan
		Peruntukan kawasan

*) Sintesa Pustaka, 2020



Tabel 2. 4 Diskusi Teori Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kontribusi dalam penelitian
1.	Rifiyan dan Sulistyani (2016)	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Eko-Budaya	Analisis kualitatif deskriptif	Pengembangan suatu desa wisata harus memperhatikan daya tarik wisata, sarana akomodasi, fasilitas untuk pelaksanaan aktivitas wisata, aksesibilitas, dan kelembagaan	- Indikator yang diadaptasi dalam penelitian meliputi daya tarik wisata, sarana akomodasi, fasilitas untuk pelaksanaan aktivitas wisata, dan aksesibilitas
2.	Utami, dkk (2016)	Analisis Potensi Objek Wisata Pantai Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu	Analisis deskriptif kuantitatif, analisis indeks kesesuaian wisata, dan kualifikasi	Dalam menganalisis potensi suatu objek wisata ditinjau dari potensi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya	- Indikator yang diadaptasi pada penelitian meliputi potensi sosial dan ekonomi - Dalam penelitian ini juga mengadaptasi metode analisis deskriptif dan analisis klasifikasi
3.	Susanti dan Mutiawati (2019)	Evaluasi Taman Alam Sumber Seneng Rembang Sebagai Tujuan Pariwisata Dengan Menggunakan Analisis ADO-ODTWA	Analisis klasifikasi melalui skoring	Dalam pengembangan potensi wisata yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kelengkapan sarana akomodasi dan aksesibilitas melalui kerjasama dengan pemerintah dan swasta	- Indikator yang diadaptasi dalam penelitian meliputi sarana dan aksesibilitas penunjang wisata - Dalam penelitian ini juga mengadaptasi metode analisis klasifikasi melalui skoring

*) Sintesa Pustaka, 2020

“Halaman ini sengaja dikosongkan”
www.itk.ac.id



www.itk.ac.id

2.5 Sintesa Pustaka

Adapun sintesa pustaka yang merupakan hasil dari tinjauan teoritis yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan indikator dan variabel terkait penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Sintesa Pustaka

No.	Sumber	Variabel	Indikator
1.	Nawang Sari (2018), Warang (2015), Samiarta dan Mahagangga (2016), Arida (2015), Sastrayuda (2010), Pedoman (ADO- ODTWA) (2003), Rifiyan dan Sulistyani (2016), dan Utami, dkk (2016)	Potensi pariwisata	a. Daya Tarik b. Aksesibilitas c. Akomodasi d. Sarana dan prasarana penunjang e. Kondisi sosial ekonomi f. Ketersediaan air bersih g. Pengelolaan dan pelayanan
2.	Nawang Sari (2018), UU No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, Muksin (2016), Pedoman (ADO- ODTWA) (2003), dan Sihite, dkk (2018)	Daya tarik wisata	a. Keunikan Sumber Daya Alam (SDA) b. Keindahan Sumber Daya Alam (SDA) yang menonjol c. Variasi kegiatan wisata d. Kebersihan e. Keamanan
3.	Murdiastuti, dkk (2014), Zaenuri (2012), dan Sabon, dkk (2018), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2013), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (2016- 2025), Rencana Strategis Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (2016- 2021), dan Rencana Kerja Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (2016- 2021)	Kebijakan pengembangan pariwisata	a. Infrastruktur b. Pemasaran c. Lingkungan alam d. Pendanaan e. Peruntukan kawasan

*) Sintesa Pustaka, 2020